

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) APRILA DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tajudin¹, AB. Tangdililing², Herlan³

Program Magister Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aprila di Kabupaten Kubu Raya”, yang mendeskripsikan tentang pelaksanaan 4 program pendidikan luar sekolah. Rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh PKBM Aprila di Kabupaten Kubu Raya?”, dengan ruang lingkup deskripsi meliputi proses penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh PKBM Aprila dan analisis kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*treatment*) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal oleh PKBM Aprila. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa, PKBM Aprila dalam mengimplementasikan kebijakan program pendidikan luar sekolah telah menyelenggarakan 4 program kegiatan meliputi : (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (2) Program Paket A dan Paket B, (3) Program Keaksaraan Fungsional (KF) dan (4) Program Kursus Kewirausahaan Desa (KWD). Dalam proses penyelenggaraan 4 program pendidikan tersebut, terdapat 3 program pendidikan terselenggara dengan baik dan lancar meliputi Program PAUD, Program Paket A dan Paket B dan Program Keaksaraan Fungsional. Sedangkan yang mengalami hambatan atau kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan adalah program KWD disebabkan oleh materi atau kursus yang diberikan belum secara optimal mencari hal-hal yang baru (inovatif).

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah di Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak) mulai berkembang dan berdiri semenjak diluncurkannya program rintisan dan sekaligus terobosan di era otonomi

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

daerah yang dikenal dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun anggaran 1998/1999. Peluncuran dan pelaksanaan program ini semakin strategis karena dilaksanakan bersamaan dengan terjadinya krisis multidimensi, yang memiliki dampak, antara lain: (1) tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar, (2) pemutusan hubungan kerja, (3) peningkatan tindak kejahatan, (4) peningkatan anak-anak putus sekolah, (5) peningkatan keluarga miskin dan (6) banyaknya pengangguran (Sujana, 2001:78).

Pencapaian tujuan pelaksanaan pendidikan luar sekolah sangat tergantung dan bersinergi dengan komponen-komponen yang merupakan instrumental input berupa program kejar paket A, B, C, Magang, Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), Magang, Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan berbagai keterampilan seperti pembuatan batako, kue, menjahit, ayaman, pembuatan manisan, *meubel* (jendela, pintu, lemari), budidaya ikan dan keramba, ternak itik, pembuatan tempayan dan bengkel, sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan, maupun *environment input* berupa lingkungan alamiah dan lingkungan sekolah dengan ikut berperan serta sebagai obyeknya. Upaya melaksanakan kebijakan program pendidikan luar sekolah, memerlukan keterlibatan semua kekuatan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia industri dan usahawan perlu ditingkatkan. Adanya partisipasi masyarakat diharapkan program pendidikan luar sekolah betul-betul merupakan gerakan sosial (*community-based education*) melalui pembentukan PKBM, diharapkan dapat menambah dan mewujudkan kecerdasan, keterampilan, kemandirian, berdaya saing dan gemar belajar di lingkungan warga belajar, sekaligus dapat dijadikan modal memasuki pasar kerja yang penuh persaingan dan merebut peluang.

Banyaknya program kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM, dalam pelaksanaannya tentunya menemui berbagai permasalahan dan kendala. Hasil pengamatan sementara terlihat bahwa sebagian besar PKBM yang melaksanakan program kerja, belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Misalnya program Kejar Paket A, B dan C, karena kendala tempat belajar, sulit mencari tutor dan yang lebih penting lagi minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut belum tumbuh sebagaimana diharapkan. Kondisi sebagaimana diungkapkan tersebut, mendorong penulis untuk mengkajinya lebih jauh mengenai perkembangan PKBM dalam melaksanakan program pendidikan jalur nonformal serta berupaya untuk mengkaji secara menyeluruh tentang kondisi dari PKBM baik menyangkut kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*treatment*).

B. Ruang Lingkup Masalah Penelitian

Ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh PKBM Aprila di Kabupaten Kubu Raya meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi kebijakan program pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla di Kabupaten Kubu Raya?”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam *Public Policy-Making* (1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: *“Public policies are those policies developed by government bodies and official”*.

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006i:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Menurut Randall B. Ripley (1984:134-135) kebijakan publik sebaiknya dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Definisi ini masuk dalam klasifikasi Proses manajemen karena di dalamnya terdapat proses atau tahapan tindakan sebagai suatu unsur yang utama. Dalam implementasinya mempunyai 2 foci pokok yaitu kepatuhan (compliance) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Selanjutnya menurut pandangan dari administrasi Negara disini penulis mengutip pendapat David Easton; bahwa *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

James E. Anderson; (1979) *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. (*Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.*) Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administrative saja.

Riant Nugroho D membagi jenis-jenis kebijakan publik berdasarkan 3 kategori. Pembagian jenis kebijakan publik kategori pertama berdasarkan pada makna dari kebijakan publik. Berdasarkan maknanya, maka kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kebijakan publik berdasar makna kebijakan publik dengan demikian terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006ii:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*, *operational level*. Dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau Kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984:27-28) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: "*perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination*".

Tachjan (2006i:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

2. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) bahwa Implementasi adalah

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Widodo, 2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu: “Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Stewart, 2000:108) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Stewart, 2000:108). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrasi atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)”.

Bertolak belakang dengan pendekatan *top down*, pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006i:35)

3. Paradigma Pendidikan

Secara umum William F. O’noel (dalam Salim, 2002:289) menampilkan tiga konsep paradigmatic dalam berfikir untuk membahas bidang pendidikan. Pendidikan formal, informal dan nonformal memiliki peran penting dalam

melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada. Peran yang dapat dimainkan pendidikan tampaknya tergantung pada pola berfikir paradigmatis yang dimiliki. Di Indonesia paradigma radikal atau kritis, merupakan sebuah gerakan yang banyak mengandung minat di kalangan praktisi pendidikan yang berada di luar sistem birokrasi formal. Mereka adalah pemikir, pegiat LSM dan tokoh pendidikan yang berasal dari lembaga dan sekolah swasta. Pendidikan radikal atau kritis menurut Paulo Freire (dalam Salim, 2003:293) merupakan paham atau aliran yang berusaha mengadakan pembebasan dan pemberdayaan umat manusia dengan upaya yang sangat kongkrit. Paham radikal berkeinginan agar proses pendidikan mampu menciptakan ruang untuk tumbuh resistensi dan subversi terhadap sistem yang dominan. Konsep inilah menurut penulis merupakan gerakan untuk mengembangkan pendidikan nonformal di Indonesia.

4. Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)

Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki dua subsistem pendidikan yaitu pendidikan sekolah (*in-school education*) dan pendidikan luar sekolah (*out school education*). Menurut sifatnya (Sujana, 2001:ii) sub pertama disebut pula pendidikan formal sedangkan subsistem pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Di Indonesia, subsistem kedua tidak mengenal lagi istilah pendidikan nonformal dan informal karena sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan istilah Pendidikan Luar Sekolah. Pelaksanaan pendidikan luar sekolah dalam wacana pendidikan di Indonesia, telah memperoleh justifikasi secara yuridis sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional nampak mulai ada pergeseran orientasi pemerintah di bidang pendidikan. Pendidikan nonformal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

5. Strategi Pendidikan Luar Sekolah Melalui PKBM

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini menurut Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2004) selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergalikan akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan kultural dan persuasif. PKBM diharapkan dapat menjadi sentra seluruh kegiatan masyarakat, kemandirian dan kehandalannya perlu dijamin semua pihak. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat yang selama ini senantiasa di bawah bayang-bayang perencanaan dari atas.

Adapun azaz-azas yang dianut oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menurut Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (2004) meliputi 7 (tujuh) azas, yaitu:

1. Azas kemanfaatan, artinya setiap kehadiran PKBM harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam upaya memperbaiki dan mempertahankan kehidupannya.
2. Azas kebermaknaan, artinya PKBM dengan segala potensinya harus mampu memberikan dan menciptakan program yang bermakna dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar.
3. Azas kebersamaan, artinya PKBM merupakan lembaga yang dikelola secara bersama-sama, bukan milik perorangan, bukan milik satu kelompok atau satu golongan tertentu, dan bukan milik pemerintah. PKBM adalah milik bersama, digunakan bersama, untuk kepentingan bersama.
4. Azas kemandirian, artinya PKBM dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan harus mengutamakan kekuatan diri sendiri. Meminta dan menerima bantuan dari pihak lain merupakan alternatif terakhir bila kemandirian belum dapat tercapai.
5. Azas keselarasan, artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM harus sesuai dan selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar.
6. Azas kebutuhan, artinya setiap kegiatan atau program pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM, harus dimulai dengan kegiatan pembelajaran yang benar-benar paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat.
7. Azas tolong-menolong, artinya PKBM merupakan arena atau ajang belajar dan pembelajaran masyarakat yang didasarkan atas rasa saling asah, saling asih dan saling asuh di antara sesama warga masyarakat itu sendiri.

6. Teori Analisis SWOT

Upaya mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan program PLS yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Kubu Raya sangat diperlukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Secara teoritis lebih dikenal dengan analisis lingkungan strategis atau analisis metode SWOT (*Strengths, Weaknesse, Oppurtunities dan Threats*). Dalam prakteknya, analisis SWOT membagi analisis ke dalam 2 (dua) lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal terdiri dari kekuatan (S) dan kelemahan (W), sedangkan analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang (O) dan ancaman (T). Melalui analisis SWOT tersebut, diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran tentang kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dihadapi PKBM dalam perkembangannya. Menurut Kurtz (2008,45), SWOT analisis adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencanaan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari eksternal. Menurut Pearce and Robinson (2003:134), analisis SWOT perlu dilakukan karena analisa SWOT untuk mencocokkan “fit” antara sumber daya internal dan situasi eksternal perusahaan. Pencocokan yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan dan meminimumkan kelemahan dan ancamannya. Asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang kuat untuk design strategi yang sukses.

Menurut Wikipedia, analisis SWOT (singkatan bahasa Inggris dari kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, kesempatan/*opportunities*, dan ancaman/*threats*) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Robert W. Duncan (2007: 142), menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan hal penting dalam proses perencanaan strategi. Faktor-faktor lingkungan internal di dalam perusahaan biasanya dapat digolongkan sebagai *Strength* (S) atau *Weakness* (W), dan lingkungan eksternal perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai *Opportunities* (O) atau *Threat* (T). Analisis lingkungan strategi ini disebut sebagai analisis SWOT.

Menurut Thompson (2008,97), analisa SWOT adalah simpel tetapi merupakan alat bantu yang sangat kuat untuk memperbesar kapabilitas serta mengetahui ketidakefisienan sumber daya perusahaan, kesempatan dari pasar dan ancaman eksternal untuk masa depan agar lebih baik lagi. Lebih lanjut menurut Fred David (1997:134), analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada PKBM Aprila yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Km 14,5, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun pertimbangan pemilihan daerah ini adalah PKBM Aprila selama ini telah bergerak atau berjalan melaksanakan program pendidikan nonformal seperti program PAUD, Keaksaraan, Program Paket A, Paket B dan Paket C serta Taman bacaan Masyarakat (TBM). Metode yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan metode purposif yang terdiri dari pengelola PKBM dan masyarakat sekitarnya yang dijadikan informan kunci (pokok). Selain itu untuk mendapatkan informasi lainnya, peneliti memperoleh data dari beberapa komponen seperti Kelompok Pendamping PKBM, Kepala Desa dan Pemuka masyarakat. Ada beberapa tahapan dari penelitian yang dilakukan yakni tahap eksplorasi atau observasi umum dan terfokus, tahap pengumpulan data dan tahap konfirmasi data. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara dan catatan observasi.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Oleh PKBM Aprila

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PAUD yang diselenggarakan di PKBM Aprila Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan maupun situasi dan kondisi yang ada.

Berdasarkan empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi dan disposisi merupakan faktor yang lebih dominan mempengaruhi keberhasilan program tersebut, yang dibuktikan bahwa para pihak yang terlibat berupaya melakukan pendekatan dengan cara menyampaikan informasi langsung kepada semua pihak yang terlibat secara jelas selama program berlangsung. Secara umum nampak bahwa implementasi program PAUD yang diselenggarakan sudah dirasakan baik oleh para peserta didik sebagai sasaran program, terutama faktor komunikasi dan disposisi. Hal ini membuktikan bahwa kedua faktor tersebut lebih dominan dan mampu mempengaruhi terciptanya keberhasilan implementasi program PAUD di PKBM Aprilla.

B. Implementasi Kebijakan Program Kejar Paket A dan Paket B

Selain program PAUD yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla program lainnya adalah Kejar Paket A dan Kejar Paket B. Program Paket A dan Paket B dianggap masih perlu dilakukan mengingat beberapa desa di Kecamatan Sungai Raya masih banyak warga atau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan setingkat SLTP. Oleh sebab itu, program Paket A dan Paket B masih diperlukan kehadirannya dan dilaksanakan agar tingkat pendidikan masyarakat menjadi lebih meningkat.

Menurut data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah peserta paket A sebanyak 60 orang sedangkan Paket B sebanyak 180 orang. Adapun lokasi dilaksanakan program Paket A dan Paket B di 5 desa yaitu: desa Arang Limbung, Desa Sungai Asam, Desa Madu Sari dan Desa Pulau Limbung. Kondisi objektif pembelajaran pada pendidikan kesetaraan program paket A dan B subjek penelitian ini berdasar kepada standar yang diberlakukan pemerintah khususnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kajian ini diarahkan pada upaya menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan dan kemandirian warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran serta kemampuan tenaga pendidik/tutor dalam membangun program pembelajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa 5 desa yang menjadi tempat dilaksanakannya program Paket A dan Paket B disebabkan oleh masyarakat yang berada di 5 desa tersebut masih banyak masyarakat, terutama yang berumur 25 tahun ke atas yang berpendidikan rendah (tidak tamat SD dan tidak tamat SMP). Kondisi ini disebabkan oleh kemiskinan penduduk dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan pada masa usia muda mereka sehingga kepedulian atas pendidikan pada masa itu masih sangat rendah. Oleh sebab itu seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dan adanya keinginan mereka untuk meningkatkan pendidikan, maka alternatifnya adalah dengan mengikuti program paket A maupun paket B.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa dari sejumlah 60 orang warga belajar paket A dalam perjalanannya ternyata hanya tinggal 35 orang yang masih aktif belajar sampai ujian sedangkan sisanya sebanyak 25 orang putus ditengah jalan. Demikian juga dengan program paket B yang semula berjumlah 80 orang menyusut menjadi 40 orang. Penyebab terjadinya penurunan jumlah peserta Kejar Paket A di PKBM Aprilla antara lain: (a) terdapat peserta yang malu mengikuti program Kejar Paket A (b) terdapat di antara peserta

yang sibuk bekerja sehingga pada saat sore hari mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan akhirnya tidak aktif. (c) terdapat peserta didik yang mau terdaftar sebagai peserta namun tidak mau belajar di kelas sehingga namanya dicoret. Kondisi tersebut berdampak kurangnya motivasi peserta didik untuk belajar secara lebih aktif. (d) peserta didik yang semula mengikuti Kejar Paket A hanya mengharapkan bantuan dana dari keikutsertaan mereka di Kejar Paket A, akan tetapi setelah sekian lama tidak juga didapatkan dan tidak adanya kejelasan kapan mereka mendapat bantuan akhirnya mereka berhenti atas keinginan sendiri. Ini maksudnya motivasi mereka masuk Kejar Paket A hanyalah untuk mendapat bantuan semata, bukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka. Pola pemikiran sebagian besar masyarakat yang menganggap setiap program yang dijalankan akan memberikan bantuan dana bagi pesertanya, tetapi setelah apa yang diharapkannya tidak tercapai, maka mereka dengan sendirinya mengundurkan diri atau melepaskan diri dari program tersebut. Kondisi ini terjadi disebabkan mereka yang menjadi peserta tetapi tidak memiliki pemahaman yang jelas dari tujuan diselenggarakannya Kejar Paket A oleh PKBM Aprilla.

Program Kejar Paket B yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla dimana semula terdaftar sebanyak 80 orang dan setelah akan diselenggarakan ujian mengalami penurunan peserta menjadi 40 orang. Dari jumlah tersebut yang mengikuti ujian, sebanyak 40 yang dinyatakan lulus. Hasil yang dicapai oleh PKBM Aprilla yang mampu meluluskan sebanyak itu menurut informan merupakan suatu prestasi keberhasilan yang cukup membanggakan. Namun terlepas dari itu, apabila ditelaah secara mendalam nampak bahwa program Kejar Paket B yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla yang semula berjumlah 80 orang hanya menjadi 40 orang.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pendirian PKBM Aprilla dengan melaksanakan program Kejar Paket A dan Paket B disini pihak pengelolanya tidak hanya membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga ada unsur keuntungan yang mereka harapkan baik dari peserta maupun dari bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada PKBM yang mendapat pendampingan tersebut. Walaupun demikian, tidak semua yang dikemukakan di atas akhirnya menjadi penghalang bagi terciptanya lembaga masyarakat untuk mengelola pendidikan luar sekolah. Tetapi harapan untuk ke depan, perlu adanya pola pendampingan yang benar-benar menciptakan lembaga tersebut (dalam hal ini PKBM) untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh PKBM perlu diperbaiki dan disempurnakan.

C. Implementasi Kebijakan Program Keaksaraan Fungsional

Program KF yang selama ini diselenggarakan menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak terbantahkan dan patut dibanggakan dari PKBM Aprilla yang dapat menjaring peserta sebanyak 100 orang dari 5 desa yang menjadi tempat diselenggarakannya program KF. Adapun nama-nama desa yang menjadi bagian dari diselenggarakan program Kf yaitu: desa Arang Limbung, Desa Limbung, desa Pulau Limbung, Desa Sungai Asam dan desa Madu Sari dengan masing-masing desa berjumlah 20 orang. Begitu besarnya minat masyarakat di 5 desa untuk mengikuti program KF yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla

sebagaimana dikemukakan informan disebabkan oleh tutor yang menjadi pengajar (1 kelompok belajar) terdiri dari 2 orang tutor sudah cukup pengalaman di bidangnya, sehingga dalam memberikan materi dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta. Selain itu faktor lain yang menyebabkan minat masyarakat cukup besar disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk program KF gratis karena sudah dibiayai dari dana APBD maupun APBN dan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan KF juga mendapat sertifikat.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan bahwa salah satu penyebab keberhasilan program KF yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla di Kecamatan Sungai Raya adalah dengan adanya pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di tiap-tiap desa dimana diselenggarakannya program KF. Melalui TBM ini menjadi sarana bagi peserta KF untuk memperlancar mereka membaca buku-buku yang ada di TBM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. TBM juga menjadi media bagi peserta KF untuk bersama-sama belajar membaca, menulis dan mengenal huruf agar lebih lancar secara bersama-sama untuk belajar. Dengan kata lain, TBM yang ada di desa mereka menjadi sarana untuk berkumpul secara bersama untuk belajar membaca secara berkelompok. PKBM Aprilla telah membangun TBM sebagai upaya untuk mensukseskan program minat baca dikalangan masyarakat serta mensukseskan program KF. Hal ini karena ada keterkaitan dengan didirikannya TBM menjadi sarana bagi warga belajar KF untuk meningkatkan kemampuan membaca yang dapat disalurkan secara bersama diantara para warga belajar di TBM yang telah tersedia. Disinilah peran tutor untuk memotivasi warga belajar untuk mengajak mereka pergi ke TBM untuk membaca tulisan sesuai dengan kebutuhan dari warga belajar.

D. Implementasi Kebijakan Program Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)

Berkaitan dengan penelitian ini, maka strategi keempat yaitu melalui PKBM diharapkan menjadi strategi ampuh dalam menanggulangi masalah kemiskinan seperti yang dilakukan oleh PKBM Aprila. Sampai saat ini jumlah peserta yang mengikuti program kewirausahaan desa (KWD) sebanyak 80 orang yang dibagi ke dalam 8 kelompok usaha. Adapun anggota yang mengikuti program KWD diambil dari 5 desa yaitu desa Arang Limbung, Desa Limbung, desa Sungai Asam, desa sungai limbung dan desa Madu Sari. Adapun jenis usaha yang dikembangkan dari 8 kelompok meliputi bidang pertanian dan peternakan sapi. Dalam usianya yang baru lima tahun, PKBM “Aprila” telah menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, termasuk program KWD meliputi keterampilan menjahit pakaian, keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan membuat makanan ringan, keterampilan pertanian, keterampilan peternakan yang diikuti pemuda dari para pemuda dan warga sekitar.

Peranan KWD yang dilakukan oleh PKBM Aprila dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kiranya menjadi sangat penting dan strategis dengan pertimbangan bahwa keberhasilan program KWD nantinya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas warga miskin melalui keterampilan usaha yang mendorong peningkatan ekonomi, dan secara tidak langsung juga berdampak pada berkurangnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, serta bertambahnya lapangan pekerjaan bagi warga pengangguran di Kecamatan Sungai Raya. Melalui kegiatan KWD oleh PKBM

yang pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber dan potensi lokal, yang secara ekonomi dapat dikembangkan dan mendukung pembangunan ekonomi lokal, diharapkan nantinya warga miskin dapat mempunyai, mengelola dan mengembangkan keterampilan usaha yang telah diperolehnya, baik dalam bentuk Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), industri kecil, maupun usaha secara individu.

Begitu besarnya minat masyarakat mengikuti KWD yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla sebagaimana dikemukakan informan disebabkan oleh tutor yang menjadi pengajar termasuk sudah pengalaman di bidangnya, sehingga dalam memberikan materi dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta. Selain itu faktor lain yang menyebabkan minat masyarakat cukup besar disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk program KWD bersumber dari APBN sehingga tiap kelompok diberikan bantuan dana.

Program KWD yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla masih dianggap belum secara optimal mencari hal-hal yang baru (inovatif), seperti KWD bidang jasa maupun usaha lainnya. Secara terpisah diungkapkan oleh salah satu pengurus PKBM Aprilla bahwa, alasan mengapa program KWD lebih difokuskan pada kegiatan pertanian dan peternakan sapi. Hal ini ada kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh desa dimana program KWD ini dilaksanakan yang lebih cocok untuk kedua jenis usaha tersebut. Dimana pada 5 desa yang menjadi lokasi kegiatan program KWD potensi yang dimiliki adalah sebagai lahan pertanian dan tempat peternakan sapi. Oleh sebab itu, tidak salah manakala akhirnya dalam program KWD ini akhirnya pilihan usaha untuk dikembangkan adalah sektor pertanian dan peternakan sapi. Program KWD yang diselenggarakan oleh PKBM Aprilla dalam realisasinya masih mengalami berbagai hambatan atau kendala, sehingga perlu dilakukan berbagai usaha perubahan seperti pelatihan kerja, dan manajemen pemasaran bagi para peserta, dengan harapan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan itu diharapkan kualitas barang yang dihasilkan semakin meningkat dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan dapat dihitung keuntungan ataukah kerugiannya. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak terutama dari pengelola PKBM Aprilla untuk terus berusaha menciptakan suatu program yang benar-benar memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup terutama bagi peserta pada khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya.

F. Analisis Swot Pkbm Aprilla Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Kcamatan Sungai Raya

1. Kekuatan dan Kelemahan Pada Pelaksanaan Program PKBM

a. Kekuatan

- 1) Realisasi program PKBM juga didukung oleh tutor yang berpengalaman dan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.,
- 2) Adanya dukungan dana operasional yang ditujukan kepada warga belajar dan pengelola PKBM, baik dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten, dukungan Diknas provinsi melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten

Kubu Raya dan Kasi Pendidikan Luar Sekolah, Penilik Dikmas, dukungan dari Tenaga Lapangan Dikmas (LTD), kecamatan, dan ketua LPM, Kepala Sekolah dasar dan usaha-usaha kecil di lingkungan masyarakat

- 3) Memiliki jumlah tutor yang lengkap dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan oleh PKBM Aprila.
- 4) Manajemen dalam pengelolaan kelembagaan PKBM yang sudah mapan sehingga mampu mengelola program dengan sebaik-baiknya.
- 5) Semangat kerja dan didukung dengan jiwa pengabdian yang tinggi, pengelola memiliki pengalaman di bidang PLS, mau belajar dan bersedia menerima masukan, diperkuat melalui pemberian pelatihan bagi pengelola PKBM dan adanya program kerja jelas. Semua faktor ini menjadi kata kunci dan penentu keberhasilan program PKBM.
- 6) Terdapat keterampilan yang dipelajari warga belajar dan dapat dijadikan bekal sebagai kecakapan hidup seperti pembuatan batako, jahit menjahit, kerajinan dan kue-kue.
- 7) Program PKBM juga akan semakin sukses karena peminat program KF, kejar Paket A, dan B, program KWD dan PAUD cukup besar.

b. Kelemahan

- 1) Ketua PKBM masih kurang berpengalaman dan begitu terlibat dalam banyak kegiatan teknis seperti menjadi tutor, mengundang warga Kejar, menggerakkan dan memotivasi terus menerus, sehingga upaya pendekatan PKBM kepada tokoh-tokoh dan berbagai pihak masih kurang mendapat perhatian, pembagian kerja ada yang kurang jalan, insentif yang diterima pengelola dan tutor kecil dan kadang diterima terlambat.
- 2) Pendekatan yang dilakukan oleh pengelola PKBM terhadap instansi pemerintah tergolong masih kurang, tetapi ketergantungan pengurus kepada Diknas atau Subdin PLS masih sangat tinggi, demikian juga upaya memotivasi warga belajar masih belum optimal, serta profil PKBM yang telah dibuat masih banyak kelemahan, dan pengalaman menulis proposal masih kurang.
- 3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KF adalah warga kejar, aktif di awal pelaksanaan, cepat bosan dalam mengikuti program, motivasi belajar kurang, sibuk dengan pekerjaan rutin sehari-hari, tempat belajar kurang mendukung dan sulit mendapatkan tempat belajar.
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan berbagai program pembelajaran di PKBM. Aprila..
- 5) Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kejar Paket A adalah warga Kejar juga aktif di awal kegiatan, kurang motivasi belajar sehingga terus-menerus dimotivasi, terdapat peserta yang malu sebagai peserta program, dukungan orang tua terhadap anak untuk mengikuti program kurang, serta tempat belajar kurang mendukung dan sulit mendapatkan tempat belajar.

- 6) Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kejar Paket B adalah warga Kejar juga aktif di awal kegiatan, kurang motivasi belajar, dukungan orang tua terhadap anak untuk mengikuti program kurang, lebih mementikan pekerjaan dan belajar terkesan asal-asalan karena sebagian peserta telah berusia dewasa, tidak mudah mendapatkan tutor yang berpengalaman terutama bidang IPA dan jumlah tutor sedikit akibat kemampuan pengelola PKBM menyediakan honor masih sangat terbatas.
- 7) Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PAUD adalah warga peserta yang berhenti di tengah jalan sebagai akibat masih dipercayai orang tua terhadap PKBM selaku penyelenggara program PAUD, sebagian orang tua kurang memberikan dukungan karena kesibukan pekerjaan rutin, sedangkan di sisi lain anak harus selalu ditunggu serta sarana dan prasarana kurang memadai.
- 8) Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KWD adalah peserta KWD lebih banyak aktif di awal kegiatan, antar anggota kurang kompak, unit usaha yang diusahakan telah banyak diusahakan oleh orang lain. KWD yang bersangkutan dapat memproduksi barang tetapi sulit memasarkan produknya, banyak KWD yang tidak jalan lagi, modal usaha habis dan pangsa pasar seringkali belum diperhitungkan.
- 9) Permasalahan PKBM yang terkait dengan tutor adalah sebagian besar tutor masih lebih mengedepankan kemampuan akademis atau belajar dibandingkan materi yang terkait dengan keterampilan atau kecakapan hidup dan tidak mudah mencari dukungan tutor untuk pelajaran kelompok IPA.
- 10) Permasalahan PKBM terkait dengan dana operasional adalah dana pendukung belum dapat mencukupi kebutuhan, belum menggali dukungan dana dari instansi pemerintah di luar Diknas termasuk pemerintah provinsi dan Kabupaten, belum menggali dukungan dana dari BUMN/BUMD, belum menggali dukungan dana dari tokoh masyarakat dan belum membentuk dewan penyantun.
- 11) Pembinaan yang dilakukan oleh Subdin PLS dan jajarannya terhadap PKBM tergolong belum optimal, termasuk pengawasan dan monitoring.
- 12) Dukungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan terhadap PKBM tergolong belum aktif, terutama dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta belum pernah memberikan motivasi kepada pengelola, tutor dan warga belajar di lokasi kegiatan secara langsung.
- 13) Dukungan ketua LPM dan tokoh masyarakat tergolong belum proaktif melakukan pembinaan, motivasi, pengawasan dan monitoring, kurang berperan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh PKBM, masih sangat terbatas dari tokoh dan masyarakat yang mengetahui tentang PKBM masih sangat kurang sebagai akibat pengurus kurang melakukan sosialisasi.

- 14) Dunia usaha belum banyak mengetahui tentang PKBM dan kepedulian mereka terhadap PKBM masih sangat kurang karena pengelola PKBM itu sendiri belum proaktif melakukan sosialisasi program.
- 15) Keterampilan yang dipelajari oleh peserta KF, KWD telah banyak yang diketahui orang lain atau menjadi usaha dan sumber penghidupan orang banyak warga, dan mereka bisa memproduksi sesuatu, tetapi sulit menjual sebagai akibat langsung dari pangsa pasar masih kurang diprediksi.
- 16) Dukungan fasilitas belajar masih sangat kurang sehingga program kerja menjadi terganggu.
- 17) Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan PKBM yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan (paket A, paket B,), Keaksaraan Fungsional (KF), KWD dan program lainnya

c. Peluang

- 1) Pengembangan program secara berkelanjutan masih terbuka luas karena sasaran program masih cukup banyak seperti program PAUD, KF, Kejar Paket A, B dan C, program Magang dan KWD serta berbagai kursus.
- 2) Dukungan potensi tutor dan dana operasional bagi PKBM yang masih tersedia.
- 3) Potensi dukungan pemerintah pusat semakin besar termasuk pemerintah Kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua LPM, tokoh masyarakat dan dunia usaha.

d. Ancaman

- 1) Kinerja pengelola PKBM ke depan di prediksi menurun karena pemerintah yang mengelola bidang pendidikan luar sekolah tidak lagi menyediakan insentif bagi pengelola PKBM.
- 2) Pelaksanaan program KF akan terkendala karena adanya tuntutan ekonomi peserta KF, juga sebagai kepala rumah tangga sehingga waktu belajar mereka kurang mendapat perhatian sebagai akibat kesibukan mencari nafkah, budaya belajar di lingkungan peserta KF yang kurang mendukung dan tidak mudah mencari tempat belajar.
- 3) Pandangan miring dari lingkungan masyarakat sekitar yang menganggap pendidikan di PKBM sebagai pendidikan kelas dua yang ijazah lulusannya sekedarnya "ijazah-ijazahan" dari yang bernama "sekolah-sekolahan"
- 4) Ancaman bagi pelaksanaan program KWD adalah saingan usaha banyak, mereka yang siap menjadi bapak angkat masih langka dan yang siap jadi mitra usaha juga masih sangat sulit ditemukan.
- 5) Ancaman bagi pelaksanaan program magang dukungan dari dunia usaha yang memiliki prospek sebagai sumber penghidupan masih terbatas dan tempat magang belum bervariasi.
- 6) Ancaman dalam pelaksanaan program Kejar paket A, B dan C adalah dukungan orang tua terhadap anak untuk mengikuti program kurang,

tidak mudah mencari tempat belajar, diantara mereka masih berat membantu bekerja orang tua dan tidak mudah mencari tutor untuk mata pelajaran IPA.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari segi Komunikasi terutama dalam proses sosialisasi program PAUD yang diberikan sudah cukup jelas, yang tidak hanya dilakukan pada pihak pelaksana program saja, tapi dalam hal ini pihak pelaksana program yaitu Pengelola atau Kepala Sekolah beserta Tenaga Pendidik juga melakukan sosialisasi kepada sasaran program, yaitu masyarakat maupun wali murid. Sumber daya yang terkait dalam implementasi program PAUD ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran (dana). Sumber daya anggaran (dana) pada implementasi program PAUD di PKBM Aprila berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya berupa bantuan fungsional, untuk bantuan operasional sementara ini belum ada. Tetapi para pelaksana program baik kepala sekolah, bendahara, maupun tenaga pengajar lainnya masih melakukan sistem swadaya. Sikap para pelaksana kebijakan atau disposisi, ditinjau dari pihak pelaksana program PAUD di PKBM Aprila ini sangat memberikan respon positif terhadap adanya program PAUD tersebut.
2. Implementasi program PAUD yang diselenggarakan di PKBM Aprila Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan maupun situasi dan kondisi yang ada. Berdasarkan empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi dan disposisi merupakan faktor yang lebih dominan mempengaruhi keberhasilan program tersebut, yang dibuktikan bahwa para pihak yang terlibat berupaya melakukan pendekatan dengan cara menyampaikan informasi langsung kepada semua pihak yang terlibat secara jelas selama program berlangsung di PKBM Aprila.

B. Saran-saran

1. Untuk Program PAUD di PKBM Aprila perlu untuk menyediakan gedung yang ada sekarang kurang layak untuk dijadikan suatu tempat belajar. Seharusnya baik pemerintah memperhatikan kelayakan gedung untuk menunjang proses berjalannya implementasi program PAUD.
2. Untuk Program Kejar Paket A dan Paket B dalam implementasi dari waktu ke waktu jumlah warga belajarnya yang terus mengalami penurunan, maka perlu dilakukan motivasi kepada warga belajar bahwa manfaat yang dapat diperoleh apabila bertahan dan mengikuti program paket a maupun paket B.
3. Untuk program Keaksaraan Fungsional, perlu tetap diselenggarakan mengingat masih banyak warga sekitarnya yang masih tidak bisa calistung (membaca, menulis dan berhitung).
4. Program KWD hendaknya pihak PKBM Aprila melakukan inovasi baru terutama dalam hal kursus yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan

- masyarakat sehingga hasilnya dapat menjadi modal dalam mendapatkan penghasilan bagi keluarga mereka.
5. Perlu diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperkirakan bermanfaat bagi kemajuan PKBM, antara lain: (a) pembuatan laporan PKBM, termasuk profilnya, (b) Penyusunan proposal untuk mendapatkan bantuan dari instansi atau lembaga keuangan seperti BUMN/BUMD, perbankan dan lembaga swasta lainnya. (c) pembukuan sederhana, dan (d) pelatihan peternakan sapi yang nyata telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat.
 6. Mencari mitra usaha dalam mensukseskan program KF, Magang dan KWD yang telah berhasil sehingga diharapkan para lulusannya juga akhirnya diterima ditempat usaha mereka.
 7. Melakukan evaluasi, monitoring lapangan dan pengawasan serta mendiskusikan hasil temuan dan memberikan masukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E, (2nd ed), 1979, *Public Policy Making*, New York: Holt Rhonehart and Winston.
- Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, 2004, *Memutus Rantai kemiskinan Melalui Pembelajaran Masyarakat*, Jakarta, Dep. Diknas
- Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, 2004, *Pedoman Penyelenggaraan program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Nonformal*, Jakarta, Dep. Diknas.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 1992, *Understanding Public policy*. Englewood, Cliff Prentice-Hall
- Edward, George C, III, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Texas A & M University, Congressional Quartely Press.
- Grindle, Marele, S. 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy M. Irfan 2001, *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.
- Lester, James, P. dan Joseph Stewart Jr. 2000, *Public Policy: An Evolution Any Approach*, Belmont: Wodsworth.
- Mazmanian, Daniel A, et.al, 1983, *Implementation an Policy*, USA: Scott, Foreman and Company.
- Meter, Donald van and Horn, Carl E. Van, 1975, *The Policy Implementatiton Proce: A Conceptual Framework*. Administration and Society, Vol 6. No. 4

- Moeleong, Lexy. J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, D, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne, 2006, *Public policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Presada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Sihombing, Umberto, 1999, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa depan*, Jakarta, MahKabupaten.
- Sudjana, H.D, 2001, *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah Teori Pendukung Asas*, Bandung, Falah Production.
- Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Tachjan, H, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad,
- Thompson. John L. 2008. *"A Strategic Perspective of Entrepreneurship."*UK: Huddersfield University Business School.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta
- Wahab, S.A. 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, et.al, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Widodo, 2011, *Good Governance telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2005, Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press.